

DEMOKRASI YANG TERJUAL



KLIENTELISME-KUASA & POLITIK
PATRONASE Dalam DEMOKRASI ELEKTORAL



Dr. Muh. Endang SA
Prof. Dr. Nasruddin Suyuti
Dr. Bahtiar
Dr. Najib Husain
Dr. Hasddin

Demokrasi yang Terjual

*Klientelisme-Kuasa & Politik Patronase
dalam Demokrasi Elektoral*

Penulis:

Dr. Muh. Endang SA

Prof. Dr. Nasruddin Suyuti

Dr. Bahtiar

Dr. Najib Husain

Dr. Hasddin



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Demokrasi yang Terjual

*Klientelisme-Kuasa & Politik Patronase
dalam Demokrasi Elektoral*

**Dr. Muh. Endang SA
Prof. Dr. Nasruddin Suyuti
Dr. Bahtiar
Dr. Najib Husain
Dr. Hasddin**

**TATA LETAK:
Brucad Al-Maghribi**

**DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar**

**SUMBER:
www.tdjpublisher.com**

**ISBN:
978-634-7193-40-7**

**CETAKAN PERTAMA:
Mei 2025**

**UKURAN:
ix + 174 Hal; 15,5 cm x 23 cm**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com**

PENGANTAR PENULIS

Buku ini lahir dari keinginan untuk menggali dan memahami praktik klientelisme dalam kerangka politik yang lebih luas, melalui pendekatan lintas negara yang kaya dan beragam. Klientelisme kerap dianggap sebagai penghambat demokrasi yang sehat, namun di sisi lain, ia juga dapat dilihat sebagai respons adaptif masyarakat terhadap ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara merata.

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena klientelisme, dimulai dari landasan teoritis seperti Transformation Theory, teori politik, dan teori komunikasi politik, yang membantu menjelaskan bagaimana relasi kuasa terbentuk dan beroperasi dalam ruang demokrasi modern. Selanjutnya, pembaca diajak menelusuri dinamika politik elektoral yang menjadi lahan subur bagi berkembangnya hubungan patron-klien, terutama dalam konteks sistem demokrasi yang bersifat prosedural.

Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pembahasan mendalam tentang praktik klientelisme dalam kontestasi pemilu dan pilkada, termasuk kontroversi yang menyertainya. Di sini, kami mencoba menyoroti dua sisi mata uang klientelisme: di satu sisi memberikan akses langsung ke sumber daya, di sisi lain menciptakan ketergantungan dan memperlemah akuntabilitas politik. Uraian ini diperkuat dengan berbagai bukti empiris dari literatur internasional mengenai praktik klientelisme di sejumlah negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan tentu saja Indonesia.

Buku ini juga memberikan fokus khusus pada praktik klientelisme di kalangan masyarakat pesisir dan pedesaan, khususnya nelayan dan petani, yang kerap menjadi basis dukungan politik dalam pemilu lokal. Dalam konteks ini, hubungan antara elite politik dan masyarakat akar rumput terlihat sangat pragmatis, bahkan transaksional. Dampaknya tidak hanya pada proses elektoral, tetapi juga pada arah pembangunan dan distribusi keadilan sosial.

Dengan pendekatan yang interdisipliner dan kontekstual, buku ini tidak hanya menyajikan teori dan pemikiran kritis, tetapi juga refleksi praktis tentang bagaimana demokrasi lokal dapat diperkuat melalui pendidikan politik, regenerasi elite, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik jangka panjang.

Semoga buku ini menjadi bacaan yang membuka ruang dialog, refleksi, dan tindakan nyata bagi siapa saja yang peduli pada masa depan demokrasi yang lebih substansial dan berpihak kepada rakyat.

Kendari, Maret 2025

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Edhie Baskoro Yudhoyono

Dengan penuh rasa syukur, bangga dan apresiasi menyambut hadirnya buku "Demokrasi yang Terjual: Klientelisme - Kuasa dan Politik Patronase dalam Demokrasi Elektoral" sebagai kontribusi yang bernas bagi pemahaman kita terhadap dinamika Demokrasi Indonesia kontemporer.

Saya menyampaikan selamat dan terima kasih tulus kepada para penulis **Dr. Muh. Endang, SA, Prof. Nasruddin Suyuti, Dr. Bahtiar, Dr. M. Najib Hussein, dan Dr. Hasdin** yang telah mencurahkan perhatian, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam menyusun karya ini.

Buku ini mengangkat tema yang sangat relevan, klientelisme dan patronase politik tak sekadar ditulis sebagai konsep, gagasan dan ide tetapi sebagai cermin dari proses politik elektoral kita. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia; cermin yang getir, karena terkadang banyak dari mereka pun terpantul di dalamnya. Klientelisme bukan sekadar praktik yang dilakukan "oleh mereka", tapi terkadang justru menjelma menjadi struktur yang menjebak kita semua: elite, pemilih dan bahkan negara.

Praktik semacam itu, seperti yang ditunjukkan dengan tajam dalam buku ini, tidak hanya menggerus kualitas demokrasi, tetapi juga memperlemah fondasi keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa.

Sebagai seorang akademis dan wakil rakyat, kita diajarkan bahwa demokrasi sejati membutuhkan deliberasi, partisipasi bermakna, serta keterbukaan dalam etika dan aturan main yang berlaku. Tapi sebagai politisi, kita belajar bahwa sering kali yang terjadi adalah sebaliknya: suara rakyat direduksi menjadi angka, program publik menjadi alat transaksi, dan kepemimpinan berubah menjadi permainan kelangkaan di mana yang memiliki akses dan sumber daya, merekalah yang berkuasa.

Mungkin inilah tragedi diam-diam dari demokrasi elektoral modern: kekuasaan tidak lagi diperebutkan lewat gagasan, melainkan lewat jaringan. Loyalitas lebih dihargai daripada

kompetensi, dan relasi patron-klien tumbuh subur dalam ruang yang seharusnya diisi oleh visi misi politik yang berpihak kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, kita harus percaya dan yakin, tidak semua harus berpikir sinis dan pesimis. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan buku ini adalah bagian dari kesadaran kolektif itu. Para penulis memadukan teori politik, sosiologi, dan komunikasi politik untuk membedah persoalan klientelisme secara komprehensif. Buku ini tidak hanya menganalisis masalah dari sisi institusional, tetapi juga mengajak kita untuk memahami berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan pun tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh akar persoalan.

Buku ini menantang kita untuk melihat demokrasi dengan mata terbuka, bukan mata yang terlanjur biasa dengan kompromi. Buku ini mengajak kita memikirkan kembali: apakah kita masih punya keberanian untuk memperjuangkan demokrasi yang berpihak pada yang lemah dan benar, bukan pada yang membayar dan berkuasa?

Dalam praktiknya, relasi patron-klien sering terjadi bukan karena masyarakat tidak paham politik, tetapi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi oleh negara, maka bantuan langsung dari aktor politik menjadi jalan keluar yang paling realistis bagi sebagian besar rakyat. Di sinilah letak tanggung jawab kita bersama: membangun sistem politik dan pemerintahan yang mampu menyediakan alternatif yang lebih bermartabat, berkelanjutan, dan adil.

Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada konteks lokal, termasuk daerah pesisir dan pedalaman. Ini penting, karena kita sering lupa bahwa wajah demokrasi di daerah tidak sama dengan yang terlihat di tingkat pusat. Demokrasi terbesar di level akar rumput sesungguhnya tercermin dalam proses Pilkades, dan hasil dari Pilkades inilah yang kerap menentukan arah relasi kekuasaan di desa. Dalam banyak kasus, Pemilu di desa-desa sering kali lebih ditentukan oleh relasi sosial dan ekonomi yang sudah mengakar, bukan ditentukan visi programatik yang ditawarkan kandidat. Karenanya, reformasi politik harus memperhitungkan keberagaman konteks ini.